

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan)

DAFITRA PRATAMA

PEMBIMBING

DESMIYAWATI, SE., M.Si, Ak

ROFIKA, SE., M.Si, Ak

e-mail:dafitrapratama@yahoo.co.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

This study aims to determine the Effects of Performance-Based Budgeting, Monitoring and Control Preventive Detective on Budgetary Control Effectiveness survey on the Lokal Government unit (SKPD) district at Pelalawan of Riau province as the research object.

The population used in this study was 26 on the Lokal Government unit (SKPD) district at Pelalawan of Riau Province, the sample is in the Environment Agency and the Department SKPD district at Pelalawan of Riau Province with 82 respondents consisting of Echelon III and IV. This type of data is the primary data collection method of data using questionnaires. The method of data analysis used in this study is multiple regression (multiple regression) with the help of SPSS software version 19.0.

The results of this study indicate that the variable performance-based budgeting does not effect the effectiveness of the Budget Control has a value of 0.079 with a significant regression coefficient of 0.418 ($P > 0.05$), no effect Preventive Monitoring the effectiveness of the budgetary control has a value of 0.023 with a regression coefficient of 0.532 significant ($p > 0.05$), Surveillance Detective has a value of 0.422 with a significant regression coefficient of 0.000 ($p < 0.05$) effect on Budgetary Control Effectiveness. Rated R square of 0.342 (34.2 %) of independent variables in this study were able to influence the dependent variable. 0.658 while the rest (65.8 %) describe other independent variables that are not observed in this study.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Monitoring Preventive, Detective Control, Budgetary Control Effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks. Sejumlah oknum di instansi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat, banyak yang tersandung masalah hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelumbungan dana proyek, dsb. Padahal penyelenggara negara yang baik, seharusnya menjadi perhatian yang serius.

Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab. Apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi publik akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money (efektifity, efficiency, economy)* (Mardiasmo, 2004).

Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (Permendagri Nomor 71 tahun 2010).

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya (Porter, 1992 dalam Fajri, 2009). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah

berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian pada anggaran adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pada penganggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diperinci dalam bentuk indikator kinerja yang merupakan target prestasi kerja dari pengelola anggaran. Oleh karena itu, pada sistem penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan pengelola anggaran untuk menspesifikasikan sasaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan alat untuk mencapainya, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya manfaat.

Kejelasan target kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai dalam model penganggaran berbasis kinerja ini menunjukkan bahwa model penganggaran ini lebih memfokuskan pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh anggaran.

Selain untuk pengendalian anggaran, seharusnya anggaran juga dapat digunakan untuk pengendalian kinerja atau prestasi kerja yang dicapai. Untuk dapat melakukan pengendalian kinerja tersebut tentunya target kinerja yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi dapat ditentukan dengan jelas dalam anggarannya. Oleh karena itu, model penganggaran berbasis kinerja yang dalam penyusunan anggarannya didasarkan pada kejelasan target kinerja seharusnya dapat digunakan

sebagai alat pengendalian kinerja disamping juga sebagai alat pengendalian anggaran. Hal ini disebabkan adanya kejelasan indikator kinerja yang akan memudahkan dalam pengendalian target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Penelitian yang dilakukan Hindri Asmoko (2006) menyimpulkan bahwa Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja.

Revrisond (2000:123) menjelaskan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Revrisond (2000: 123) menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Widjaja, 2002: 94).

Tingkat realisasi anggaran dari setiap SKPD dinilai masih banyak yang tidak mencapai target. Data tingkat pencapaian realisasi anggaran dapat kita peroleh dari informasi yang dipublikasikan pada media masa. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 kabupaten Pelalawan tingkat realisasi anggaran rata-rata SKPD yang ada di kabupaten Pelalawan berkisar pada 75%. Bahkan realisasi tahun berjalan 2013 kabupaten pelalawan baru tercapai hanya 65%. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah (www.pelalawankab.go.id).

Porter (1992) dalam Fajri (2009) mengatakan pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari standar dan berarti termasuk pengawasan preventif. Hindri (2006) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan preventif dengan efektivitas pengendalian keuangan daerah. Pada penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah eselon dua sampai eselon tiga pada Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

dan Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang diketahui, pejabat dinas pemerintahan daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arif Fuadi (2013) dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran pada SKPD Kota Bukittinggi, yang mana memberikan hasil penelitian bahwa pengawasan preventif dan pengawasan detektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini menambahkan satu variabel penganggaran berbasis kinerja yang diadopsi dari penelitian Hindri Asmoko (2006) dengan judul pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian, yang memberikan hasil bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan kinerja.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditujukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Maka penulis mencoba

melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pelalawan).**”

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan?
2. Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan?
3. Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Pelalawan.
2. Bagi SKPD dapat menjadi masukan dalam efektifitas pengendalian anggaran organisasi dengan memperhatikan pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif.
3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi Bastian (2006:171).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut Kurniawan (2009).

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (*inovasi*) dan strategi untuk menyalahi keterbatasan sumber daya.

2.1.2. Pengawasan Preventif

Pengertian pengawasan menurut Sarwoto (1968:93) dalam Shinta (2000) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

Pengawas dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya

memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986:136) dalam Shinta (2000), tujuan pengawasan:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- d. Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

Menurut Sopanah (2003) pengawasan dapat dilakukan berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi.

Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai.

Menurut Revrisond (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002: 95) mengatakan pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

2.1.3. Pengawasan Detektif

Porter (1992:177) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiapkan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Salah satu contoh pengawasan detektif adalah suatu daftar dari cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu

bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.

2.2. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh antara Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Anggaran mempunyai beberapa fungsi bagi manajemen atau para pengelola anggaran. Kenis (1979) dalam Asmoko (2006) menyatakan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan keuangan tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi. Schiff dan Lewin (1978) dalam Asmoko (2006) juga mengemukakan bahwa anggaran diterima secara luas sebagai elemen kunci dalam sistem perencanaan dan

pengendalian, sehingga anggaran memiliki peran ganda yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Lebih lanjut Mardiasmo (2004) menjelaskan anggaran sektor public mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending, underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran.

Penelitian yang dilakukan Hindri Asmoko (2006) menyimpulkan bahwa Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja. Variabel ini juga sudah pernah diteliti oleh Agustini (2009) dan hasilnya berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian.

2.2.2. Pengaruh antara Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Porter (1992:177) dalam Fuadi (2013) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif, adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi

dan mengkoreksi pemasalahan setelah terjadi. Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas maka hubungan antara pengawasan preventif dengan efektifitas anggaran saling mengikat, pengawasan detektif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlansung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut. Variabel ini sudah pernah diteliti oleh Fajri (2009), Uci Austin (2012) dan Fuadi (2013) dan hasilnya berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian.

2.2.3. Pengaruh antara Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Porter (1992:177) dalam Fuadi (2013) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyangkan

individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Revrisond (2000:118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

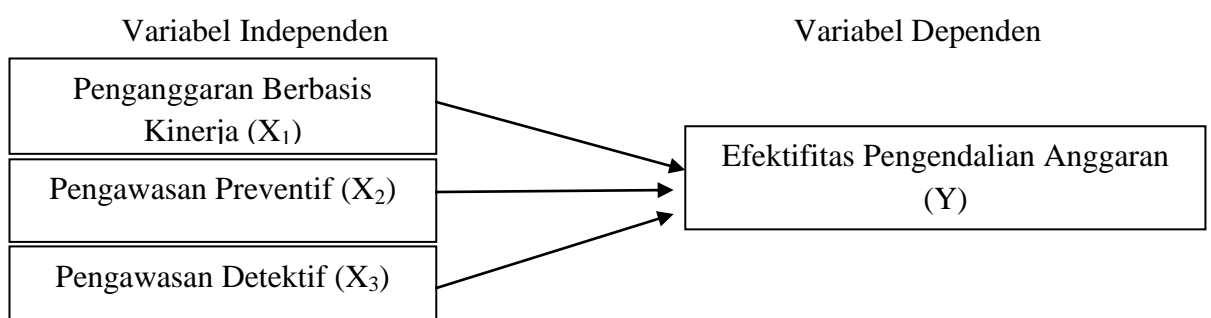
Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang

dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Variabel ini sebelumnya sudah diteliti oleh Fajri (2009), Uci Austin (2012) dan Fuadi (2013) dan membuktikan bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

2.3. Model Penelitian

Pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran

H₂ : Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

H₃ : Pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Pelalawandi Propinsi Riau. Sampel penelitian ini terdiri Badan, Dinas dan Kantor di kabupaten Pelalawan yang berjumlah 43 unit (1 Inspektorat, 2 Kantor, 9 badan, 17 dinas dan 12 kecamatan). Namun, untuk mempersempit ruang lingkup penelitian maka kuesioner hanya disebar kepada pejabat Eselon III dan IV untuk Badan dan Dinas di kabupaten Pelalawan. Untuk menentukan sampel digunakan rumus slovin.

Model rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Besarnya ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Presisi yang diinginkan untuk diambil (10%)

3.2. Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengendalian anggaran. Pengukuran dimensi atau indikator variabel digunakan Skala Likert.

3.3. Pengujian Data

Ketetapan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada suatu kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Uji kualitas data ada dua yaitu uji validitas dan uji reliabilitas (Wijaya, 2010).

3.3.1. Pengujian asumsi klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Wijaya, 2010). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

3.3.2. Pengujian Determinasi R²

Uji R² atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R² = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R² = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R² = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R² nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu

3.3.3. Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi agar model dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas dan data dalam penelitian ini

berdistribusi normal data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Kriteria pengujian untuk uji t adalah:

- a. H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$.
- b. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan software statistik SPSS 19 dengan persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

be keterangan:

X_1 = Penganggaran Berbasis Kinerja

X_2 = Pengawasan Preventif

X_3 = Pengawasan Detektif

Y = Efektivitas Pengendalian Anggaran

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

Kuesioner diberikan kepada 26 SKPD (Badan dan Dinas) dikabupaten Pelalawan. Masing-masing SKPD diberikan kuesioner yaitu kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di setiap masing-masing badan dan dinas di kabupaten pelalawan. Tingkat pengembalian kuesioner dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel4.1 :Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	150	100 %
Kuesioner yang tidak mendapat respon	45	30 %
Kuesioner yang kembali	105	70 %
Kuesioner yang dapat diolah	105	70 %

Sumber : data olahan SPSS

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 45 buah atau 30% dari total kuesioner yang disebar. Hal ini terjadi karena kesibukan para kepala bidang satuan kerja perangkat daerah dan kepala sub bagian serta seksi-seksi satuan kerja perangkat daerah untuk mengembalikan kuesioner tepat pada waktunya.

4.2. Statistik deskriptif

Tabel 4.4 menyajikan data rata-rata dalam penelitian ini diketahui jumlah responden (n) variabel (X1) sebanyak 105, nilai minimum adalah 20, nilai maximum adalah 25 dan

nilai rata-rata (mean) adalah 22,98. (X2) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 105, nilai minimum adalah 54, nilai maximum adalah 69 dan nilai rata-rata (mean) adalah 61,78. (X3) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 105, nilai minimum adalah 27, nilai maximum adalah 34 dan nilai rata-rata (mean) adalah 30,63. (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 105, nilai minimum adalah 27, nilai maximum adalah 33 dan nilai rata-rata (mean) adalah 30,77.

4.3. Hasil Pengujian Data

4.3.1. Hasil Uji Validitas & Reliabilitas

Untuk variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1), semua item pertanyaan dinyatakan valid. Variabel pengawasan preventif (X_2), pertanyaan nomor 9 dinyatakan tidak valid. Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X_4), pertanyaan nomor 14 dinyatakan tidak valid. Pengawasan detektif (X_3), pertanyaan nomor 9 dinyatakan tidak valid. Sedangkan, variabel efektifitas pengendalian anggaran (Y), pertanyaan nomor 6 dinyatakan tidak valid.

Kemudian, hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel

reliabel karena mempunyai nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Sekaran, 2003).

4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan terbebas dari masalah autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

4.3.2.1. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3: Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.971	2.549		4.697	.000
PBKTotal (X_1)	.079	.097	.098	.814	.418
PPTotal (X_2)	.023	.037	.051	.628	.532
PDTotal (X_3)	.422	.102	.502	4.142	.000

a. Dependent Variable: efektifitas pengendalian anggaran (Y)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,814. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha = 5\%$ yakni sebesar 2,275. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($0,814 > 2,275$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1) tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan.

4.3.2.2. Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat variabel pengawasan preventif (X_2), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,628. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha = 5\%$ yakni sebesar 2,275. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($0,628 > 2,275$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan preventif (X_2) tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Satuan

Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan.

4.3.2.3. Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat variabel pengawasan detektif (X_3), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,142. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha = 5\%$ yakni sebesar 2,275. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,142 < 2,275$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan detektif (X_3) t

berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan.

4.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, biasanya digunakan Adjusted R Square. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10: Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.585 ^a	.342	.323	1.35879	1.798

a. Predictors: (Constant), PDTTotal, PPTTotal, PBKTotal

b. Dependent Variable: EPATotal

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel ketaatan pada peraturan perundangan dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 16,3%, sedangkan sisanya 83,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Ini berarti, variabel independen yang digunakan kurang sesuai karena tidak dapat menjelaskan lebih dari 50% variabel dependen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah di kabupaten pelalawan. Dari penelitian

ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hal ini didasarkan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 0,814. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,275. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,814 < 2,275$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
2. Variabel pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hal ini didasarkan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 0,628. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,275.

- Maka jika dibandingkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,628 < 2,275$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa variabel pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
3. Variabel pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini didasarkan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 4,142. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,275. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,142 > 2,275$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa variabel pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.
 4. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran adalah sebesar 32,3%. Atau variabel penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif yang digunakan mampu menjelaskan 32,3% variabel efektivitas pengendalian anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari penelitian ini antara lain:

- a. Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif sedikit karena hanya melibatkan kepala sub bagian penyusunan program, kepala sub

bagian keuangan, dan kepala bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan di Dinas dan Badan dilingkungan kota Pekanbaru.

- b. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini sehingga penelitian ini kurang maksimal.
- c. Karena kesibukan kepala sub bagian penyusunan program, kepala sub bagian keuangan, dan kepala bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan di Dinas dan Badan dilingkungan kota Pekanbaru maka kuesioner hanya dititipkan. Peneliti tidak mendampingi responden saat mengisi kuesioner. Sehingga hasil jawaban yang diharapkan kurang maksimal.

5.3. Saran

Dengan keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Disarankan menambah jumlah sampel yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.
- b. Waktu penyebaran sebaiknya tidak pada waktu responden sibuk bekerja (masa Musrenbang) sehingga jumlah responden akan lebih representatif.
- c. Pada saat pengisian kuesioner sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan pendampingan pada saat pengisian kuesioner agar diperoleh hasil yang lebih akurat.

Meskipun dalam konteks yang kecil, namun hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berhasilnya

beberapahipotesis yang disusun bias menjadirujukan dan masukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan untuk mengevaluasi bagaimana sistem penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif agar dapat meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran secara khusus dan secara umum agar penggunaan anggaran jadi tepat sasaran sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Dini Dwi. 2009. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Arif, Fajri. 2009. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Askam, Tuastikal. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Finance and Banking Journal* vol. 10.No. 1.
- Austin, Uci. 2012. Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Skripsi* Universitas Riau.
- Hindri, Asmoko. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>).
- Julianto.2009. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi. *Tesis* Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jumelda.2008. Peran Informasi Asimetri dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi Dalam Hubungan Partisipasi Anggaran dan Senjangan Anggaran (Suatu Kajian Pada Industri Perhotelan di Pekanbaru). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Romi, Juliandra. 2007. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dana Pengawasan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Sopannah.2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA VI
- Sinta, Suhanda Wati. Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung. Melalui (elib.unikom.ac.id/download.php?id=77691).
- Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.